BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan politik yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah proses yang saling berkesinambungan, salah satunya adalah periode demokrasi liberal dan periode demokrasi terpimpin. Periode yang dikenal dengan nama demokrasi liberal berlangsung dari tahun 1950-1959, tetapi Herbert Feith (2007, hlm. xi) memiliki pendapat yang berbeda dengan menyebutnya demokrasi konstitusional yang menitik beratkan kepada berjalannya sistem politik yang di dominasi oleh sipil. Periode ini merupakan periode yang penuh dengan harapan-harapan baru untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di berbagai bidang. Hal tersebut terlihat dalam monografi yang ditulis oleh Herbert Feith yang berjudul *The Wilopo Cabinet, 1952-1953: A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia* yang menjelaskan mengenai kekaguman Feith terhadap negara yang baru berdiri ini sudah menggunakan demokrasi liberal seperti yang diterapkan di negara-negara Barat dimana terdapat prinsip-prinsip menghormati kebebasan individu dan *rule of law* (Tempo, 2007, hlm. 26). Periode ini juga ditandai dengan semangat untuk memperoleh kehidupan demokrasi yang sesungguhnya karena setelah proklamasi, Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan ketika demokrasi liberal maka terdapat euphoria kemenangan terhadap perjuangan yang telah dilakukan (Suwirta, 2008, hlm. 49).

Pada periode ini kebebasan bukan saja dirasakan oleh elit-elit negara tetapi juga pihak-pihak lain yang sudah mengharapkan kehidupan demokrasi yang dapat dirasakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Politik menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung kehidupan demokrasi, namun pada periode ini nampaknya kestabilan politik yang diharapkan belum bisa diperoleh. Hal tersebut terlihat dengan pergantian kabinet yang sangat cepat sehingga kesempatan untuk menjalankan suatu kebijakan dalam kabinet kurang berjalan secara optimal. Salah satu contoh kabinet yang memiliki masa jabatan singkat adalah kabinet Sukiman yang berlangsung dari bulan April 1951 sampai dengan bulan Februari 1952 (Feith, 2007, hlm. 177). Apabila dilihat dari periodenya, kabinet Sukiman memiliki masa tugas kurang dari satu tahun hal tersebut tidak terlepas dari sistem

parlemerter yang berlaku pada masa itu, menuntut eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen sehingga kabinet yang berkuasa mudah untuk digantikan. Pertanggung jawaban Perdana Menteri kepada Parlemen menunjukkan bahwa pada periode demokrasi liberal adanya keterbukaan dan tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya.

Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena fungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkrit dari tingginya akuntabilitas tersebut (Gaffar, 2000, hlm. 13).

Jatuhnya kabinet memperlihatkan akuntabilitas yang tinggi dimana adanya pertanggung jawaban dari pejabat terhadap apa yang telah dikerjakannya. Sejalan dengan hal tersebut melalui dorongan media massa, pemerintah memiliki keinginan untuk menguatkan pemerintahan dengan rakyat sehingga permasalahan masyarakat terutama sosial ekonomi dapat dipahami dengan baik oleh pemerintah (Thaha, 2012, hlm. 38). Tetapi kenyataan memperlihatkan bahwa dengan sering jatuhnya kabinet mendorong kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun. Selain kabinet yang sering berganti, pada masa Demokrasi Liberal juga timbul masalah-masalah dalam negeri yang mempengaruhi kehidupan politik Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, didalam parlemen terdapat persaingan ideologi antara ideologi agama, nasionalis, sosialis dan komunis sehingga Pancasila sebagai ideologi resmi negara bukan satu-satunya ideologi yang hidup di Indonesia tetapi bersaing dengan ideologi lainnya. Persaingan ideologi terlihat dalam partai-partai politik yang mewakili ideologi masing-masing.

Masalah yang muncul pada awal pemberlakuan demokrasi liberal adalah peristiwa 17 Oktober 1952 yang menggambarkan kondisi pada waktu itu terdapat pertentangan antara wakil rakyat dan militer mengenai program rasionalisasi angkatan bersenjata yang tidak disetujui sebagian anggota militer. Menurut Herbert Feith (dalam Hill, 2011, hlm. 49) mengungkapkan bahwa dalam kehidupan politik sendiri terdapat dua kelompok yang menjadi penanggung jawab administrasi dan penggalang solidaritas. Menurut Rusadi Kantaprawira (1983, hlm. 190) menyebutkan bahwa persaingan ideologi tidak terlepas dari gaya politik yang hidup pada waktu itu, dimana perkembangan politik yang terjadi lebih

menitik beratkan kepada faktor yang menjadi pembeda yaitu ideologi yang memiliki sifat kaku dan tidak kompromistik sehingga menimbulkan berbagai macam masalah. Boyd R. Compton mengungkapkan mengenai pengamatan dan pengalamannya pada Demokrasi Liberal sebagai berikut:

Saya ingat saat itu, konfrontasi dan konflik antar partai pada kampanye mencapai titik yang paling ekstrim, tapi kemudian semua itu berakhir pada suatu hari sunyi yang sangat menyeramkan dan aneh. Saya melihat ini sebagai tanda ketakutan mendalam, dan kegelisahan, bercampur dengan hasrat nasional. Pemilihan Umum 1955 adalah keberhasilan pendek. Tapi kemudian alat demokrasi tak berfungsi di tahun-tahun sesudahnya ketika ketika terjadi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Tahap ini memberi militer mengambil langkah-langkah yang lebih jauh... (Tempo, 2007, hm. 110-111).

Compton menilai bahwa Pemilihan Umum merupakan keberhasilan sementara yang sebenarnya tidak menyelesaikan masalah-masalah mendasar terutama mengenai persaingan antar golongan. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Ricklefs (2008, hlm. 521) yang menyatakan bahwa pemilu tersebut masih belum menghasilkan penyelesaian apa-apa dan berujung pada mendiskreditkan sistem parlementer yang selama ini diusung oleh pemerintahan. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut terlihat bahwa Pemilihan Umum tahun 1955 yang diharapkan sebagai penyelesaian dari persaingan antar partai dan ideologinya, namun pada kenyataannya memperjelas peta politik pihak-pihak yang berkonflik.

Masalah-masalah lain juga bermunculan dalam kurun waktu 1950-1959 sehingga pemerintah menilai bahwa kondisi negara sudah tidak aman lagi dengan munculnya pergolakan di daerah, pers yang dinilai mengganggu ketertiban dan keamanan melalui berita yang disembarkannya dan lain-lain yang mendorong pemerintah mengeluarkan status negara dalam keadaan bahaya atau yang dikenal dengan *Staat Van Oorlog en Beleg* (SOB) yang dikeluarkan pada tahun 1957 (Pusponegoro dan Notosusanto, 1993, hlm. 277). Maka dengan keluarnya surat tersebut kebebasan yang selama ini dijunjung tinggi pada masa awal Demokrasi Liberal segera berakhir.

Soekarno menilai bahwa demokrasi liberal tidak sesuai apabila diterapkan di Indonesia, hal tersebut didasarkan kepada pengamatannya mengenai persaingan

ideologi dan partai politik yang memperjuangkan kepentingannya saja sehingga tindak lanjut dari pernyataan Soekarno kemudian mengusulkan sebuah konsep mengenai sistem pemerintahan Indonesia sebaiknya menggunakan konsep demokrasi terpimpin yang kemudian dinyatakan Soekarno pada tahun 1958 (Feith, 1995, hlm. 18). Seiring dengan gagasan presiden maka umur dari demokrasi liberal pun segera berakhir dengan adanya kabinet Djuanda yang sering disebut sebagai kabinet peralihan dimana kabinet ini mempersiapkan berbagai hal untuk menerapkan demokrasi terpimpin. Peralihan dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang terpaksa dikeluarkan oleh Presiden atas pertimbangan kondisi negara berada dalam keadaan bahaya (Legge, 1996, hlm. 350). Situasi politik pada masa demokrasi terpimpin menunjukkan bahwa kebebasan dalam mengemukakan pendapat dibatasi oleh pemerintah karena aturan melarang adanya kritik terhadap penguasa negara.

Demokrasi terpimpin, seperti yang disebutnya itu ialah suatu cara bekerja yang melaksanakan suatu program pembangunan yang direncanakan dengan suatu tindakan yang kuat dibawah satu pimpinan. Cita-cita itu harus didukung oleh kerjasama yang baik antar empat golongan yang berpengaruh dalam masyarakat yaitu golongan-golongan nasional, Islam, komunis dan tentara (Hatta, 2004, hlm. 6)

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa demokrasi terpimpin yang dikehendaki Soekarno merupakan suatu kepemimpinan yang kuat dengan adanya kerjasama antar golongan. Kerjasama yang baik dimana golongan nasional, Islam, komunis dan tentara dapat berjalan beriringan, tetapi catatan sejarah memperlihatkan bahwa kerjasama yang diharapkan itu tidak terlihat pada demokrasi terpimpin. Hal tersebut berimplikasi kepada munculnya segitiga kekuatan besar antara Soekarno sebagai presiden, PKI dan tentara. Tiga kekuatan tersebut saling keterkaitan karena ketiganya memiliki kepentingan masing-masing. Tentara dan PKI berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan Presiden dan Presiden sendiri sebagai penyeimbang diantara keduanya. Sejalan dengan hal tersebut, baik tentara maupun PKI berusaha untuk membangun kekuatan kelompoknya agar siap menghadapi lawan-lawan politiknya.

Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah kertas tentang TNI dan masa depan Indonesia, ditulis oleh seorang teman saya pada awal Januari 1961. Ia berkata disitu, “TNI dan PKI dalam bagian terakhir dari zaman Soekarno yang sedang kita alami sekarang ini.” Kedua-duanya berusaha menghindari konflik dengan Presiden Soekarno, kedua-duanya berusaha mempergunakan pengaruh dan kekuatan legal Presiden untuk memperkuat dirinya dan untuk melemahkan pihak lain, sambil memperkuat barisan sendiri menghadapi zaman post-Soekarno nanti (Anwar, 1981, hlm. 41).

Posisi Soekarno selain sebagai presiden tetapi juga berperan sebagai penengah diantara dua kekuatan besar yang saling bertentangan. TNI dan PKI yang sama-sama berusaha untuk membangun konsolidasi dari dalam agar kekuatan mereka semakin kokoh karena kedua pihak ini memiliki pandangan yang sama, yaitu akan ada periode setelah Presiden Soekarno memerintah sehingga harus mempersiapkan kelompoknya masing-masing agar siap menghadapi periode tersebut. Kedua kelompok ini saling menyadari bahwa satu diantara mereka akan kalah dalam persaingan ini sehingga perlu membangun kekuatan dari dalam untuk melawan pihak yang bertentangan baik PKI kepada tentara dan sebaliknya. Posisi Soekarno sebagai seorang Presiden yang dibutuhkan oleh banyak pihak dan menjadi penengah dalam konflik antara tentara dengan PKI. Soekarno menyadari bahwa dalam kondisi demikian kepemimpinan yang bertindak seperti pemimpinlah yang diperlukan, dalam artian bahwa ketika dalam suatu persaingan tidak ada pihak yang menang secara mutlak sehingga untuk menyelesaikannya memerlukan keputusan lain dari pihak-pihak terlibat (Adams, 2014, hlm. 337).

Dalam kondisi tersebut, terdapat dua tokoh pers yang memiliki peranan penting pada zamannya yaitu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Keduanya merupakan tokoh penting dalam perkembangan pers Indonesia yang sama-sama lahir di Sumatra. Mereka merupakan wartawan yang memberitakan berbagai hal salah satunya adalah pemberitaan mengenai situasi politik di Indonesia. Pekerjaan sebagai seorang wartawan, mendorong kedua tokoh ini menjadi pengamat situasi politik Indonesia dan juga sebagai kritikus pada masa demokrasi liberal 1950-1959 dan begitu juga ketika demokrasi terpimpin 1960-1965.

Pada periode 1950-1965 kedua tokoh ini baik Rosihan Anwar maupun Mochtar Lubis merupakan pengamat sekaligus mejadi pihak yang mengkritik kebijakan serta tindakan pemerintah apabila tidak sesuai dengan pandangannya melalui tulisan-tulisannya dalam surat kabar mereka masing-masing. Pada masa akhir revolusi tepatnya pada tanggal 29 November 1948, Rosihan Anwar mendirikan surat kabar *Pedoman* yang didirikan di Jakarta (Anwar, 1983, hlm. 161). Setahun kemudian Mochtar Lubis mendirikan surat kabar *Indonesia Raya*. Kedua surat kabar ini dapat dikatakan sebagai representasi dari pemimpin redaksi karena pada periode tersebut berkembang *personal journalism* dimana apa yang terdapat dalam pemberitaan sesuai dengan pandangan dari pemimpin redaksinya. Menurut Atmakusumah dan Atmakusumah (1997a, hlm. xix) mengungkapkan bahwa dimasa lalu *personal journalism* di Indonesia merupakan suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh pemimpin redaksi dalam menulis tajuk rencana. Sehingga dalam skripsi ini juga akan menganalisis pandangan kedua tokoh ini melalui surat kabar yang dimilikinya.

Rosihan Anwar menyadari bahwa manusia merupakan insan politik yang ingin memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Banginya politik merupakan salah satu bidang yang menarik perhatiannya sehingga periode 1950-1965 Rosihan Anwar adalah seorang wartawan yang aktif dalam memberitakan masalah-masalah politik yang dituangkan dalam tulisannya di surat kabar sebagai komentator sekaligus pengamat dari dinamika politik yang ada.

Saya menjadi pencatat berita-berita politik, lain kali menjadi pengulas peristiwa politik. Saya dekat dengan soal-soal politik pada zaman itu yang tidak pernah hambar, sebab senantiasa ada yang baru dan tiada disangka-sangka di kaki langit. Akan tetapi dengan segala itu saya tidak dapat mengatakan saya seorang *politician*, orang yang berkecimpung dalam bidang politik praktis. Juga akan menipu diri sendiri, jikalau saya katakana saya adalah *a true political man*, insan politik yang sejati. Sebab saya pada hakikatnya seorang wartawan (Anwar, 1983, hlm. 302).

Begitu juga ketika Indonesia memasuki demokrasi terpimpin meskipun kritiknya sering menimbulkan konflik antara dirinya dengan pihak-pihak penguasa tetapi hal tersebut tidak menghalangi keinginannya untuk melakukan kritik terhadap suatu hal yang tidak sesuai dengan pandangannya. Hal tersebut terlihat dalam penutupan surat kabar *Pedoman* pada tahun 1961 dimana media

massa harus mengikuti tuntutan pemerintah agar tidak melakukan kritik terhadap pemerintah dengan menandatangani surat pernyataan yang menunjukkan kesediaan mengikuti permintaan pemerintah. Sikap lunak Rosihan Anwar mengikuti peraturan tersebut ternyata belum mengubah sikap pemerintah (Mahmud, 1992, hlm. 124). Meskipun surat kabarnya ditutup Rosihan Anwar masih melakukan kritik terhadap pemerintah selama ada hal yang tidak sesuai dengan pandangannya. Termasuk dalam ulasannya dua windu Indonesia merdeka Rosihan Anwar mengkritik apa yang telah dilakukan Soekarno sebagai seorang presiden.

Cuma yang seolah-olah dilupakan oleh Sukarno ialah pada hakikatnya dia sendiri yang mengangkat pemimpin-pemimpin yang justru di kritiknya itu dengan demikian Sukarno berlaku seperti bukan dia yang bersalah. Sukarno mengatakan dia tahu rakyat harus antri untuk beli beras, minyak tanah, sabun dan sebagainya. Tetapi buat selebihnya apakah yang ia perbuat sendiri untuk meringankan penghimpunan rakyat? Sukarno berbicara seolah-olah bukan dia yang jadi kepala eksekutif. Sukarno tahu dikalangan rakyat ada perasaan tidak senang terhadap angkatan bersenjata, maka ditegaskannya dalam pidatonya bahwa “Manipol yang pimpin Angkatan Bersenjata dan bedil, bukan sebaliknya.” Sukarno menegaskan pula supaya orang jangan menjadi anti-Nasakom sebab sumber ketakutan itu ialah komunisto-phobi (Anwar, 1983, hlm. 86).

Pernyataan tersebut merupakan salah satu kritik dari Rosihan Anwar terhadap kepemimpinan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin yang dinilai oleh Rosihan Anwar merupakan sebagai seorang pemimpin yang tidak menyadari akan tindakannya sendiri menunjuk orang-orang yang tidak sesuai dengan harapan hingga Soekarno sendiri mengkritik orang-orang yang dipilihnya. Selain itu, Rosihan Anwar juga melihat adanya kesadaran dari Soekarno bahwa di dalam masyarakat sendiri ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak suka dengan kalangan militer yang terlihat dalam pernyataan diatas dengan menyebutkan bahwa dalam kelompok militer ada yang tidak menyukai gagasan Soekarno mengenai Manipol.

Selain melakukan kritik melalui tulisannya Rosihan Anwar juga melakukan kritik melalui film. Rosihan Anwar aktif sebagai pemain, sutradara, penulis skenario. Ketertarikannya kepada dunia film menjadikan Rosihan Anwar sebagai orang yang tidak dapat dipisahkan dari bidang tersebut dengan banyaknya karya yang telah dihasilkan seperti film-film dokumenter yang menggambarkan

sejarah suatu tempat dan film-film lainnya. Melalui film, Rosihan Anwar menyisipkan kritik sosial terhadap kondisi negara pada waktu itu seperti dalam film ‘Darah dan Doa’ dimana Rosihan Anwar berperan sebagai A.H Nasution (Bintang, 1992, hlm 183). Kritiknya terhadap masalah sosial dan politik memang tidak setajam dulu ketika masih menulis dalam surat kabar. Hal tersebut terjadi karena film yang digarapnya kebanyakan berafiliasi dengan pemerintah sehingga tidak dapat bebas mengeluarkan pendapat. Rosihan Anwar aktif dalam mengamati perkembangan film Indonesia dimana pada periode 1960-1965 PKI berusaha melakukan penetrasi di segala bidang termasuk didalam film sendiri yang mendukung ide-ide nasakom dari presiden Soekarno. Penetrasi yang dilakukan PKI dalam film memunculkan pihak pro dan kontra dengan adanya pihak yang saling menyerang, proses tersebut juga tidak luput dari pengamatan Rosihan Anwar.

Pemboikotan film Amerika Serikat diintensifkan sesuai dengan keputusan rapat pleno Panitia Pusat Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) yang diadakan tanggal 27 Agustus lalu. Disamping itu kaum komunis juga meningkatkan serangan mereka terhadap tokoh-tokoh film Indonesia seperti Usmar Isma’il dan Djamaluddin Malik. Pelukis karikatur A. Sibarani dalam tulisannya berjudul “Kebudayaan Revolusioner Mutlak dalam revolusi” yang dimuat dalam *Lentera* yaitu lampiran kebudayaan yang dipimpin oleh Pramoedya Ananta Toer dari surat kabar Bintang Timur tidak tanggung-tanggung menjantamkan Umar Isma’il yang dikatakannya mempunyai pandangan *American Way of Life* (Anwar, 1981, hlm. 474).

Tokoh lain yang juga vokal dalam mengkritik pada periode 1950-1965 adalah Mochtar Lubis dengan menggunakan surat kabar yang dimilikinya terutama dapat dilihat dalam bagian tajuk-tajuk dalam surat kabar *Indonesia Raya* yang pada umumnya ditulis oleh Mochtar Lubis sendiri. Sejalan dengan hal tersebut Atmakusumah (1997a, hlm. xiv) mengungkapkan bahwa biasanya dalam tajuk-tajuk rencana yang ditulis Mochtar Lubis mencantumkan namanya sendiri untuk mempermudah pelacakan dan merupakan sebuah tanda bahwa apa yang terdapat dalam tajuk-tajuk tersebut adalah pendapat pribadinya. Tajuk-tajuk yang ditulis Mochtar Lubis seringkali berisikan suatu kritik terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan pandangannya, seperti yang diungkapkan Mochtar Lubis ketika menjadi narasumber dalam salah satu surat kabar ibu kota. “Apabila saya melihat

orang lain didera dengan berbagai cara. Saya serasa akan mengamuk kalau melihat orang disakiti di depan mata saya” (Hadimadja, 1995, hlm. 116). Dalam kutipan tersebut jelas bahwa ketika ada orang yang diperlakukan tidak semestinya maka Mochtar Lubis tidak akan tinggal diam. Implikasi dari sikap tersebut terlihat pada tulisannya dalam *Indonesia Raya* yang cenderung keras dalam mengkritik suatu hal.

Mengikuti nasib *Indonesia Raya* hingga ditutup pada 2 Januari 1959 dan mengenai Mochtar Lubis hingga akhir 1965. Bagi Mochtar, masa ini ditandai oleh seringnya kritik terhadap, dan benturan dengan, lembaga-lembaga dan individu-individu pemerintah yang berkuasa dan berakibat pada siklus lepas-tangkap (Hill, 2011, hlm. 45).

Terlihat dari pernyataan diatas bahwa Mochtar Lubis terutama pada masa kepemimpinan Soekarno sering bersinggungan dengan pihak-pihak tertentu yang mendorong Mochtar Lubis harus berurusan dengan hukum. Meskipun surat kabar *Indonesia Raya* yang dipimpin oleh Mochtar Lubis pada awalnya merupakan surat kabar yang didirikan dengan campur tangan pihak militer. Tidak dipungkiri bahwa militer peran penting dalam pendirian surat kabar ini hal tersebut tidak terlepas dari ikatan persaudaraan Mochtar Lubis dengan Bachtar Lubis yang tidak lain adalah kakaknya sendiri yang memiliki jabatan penting dalam militer serta dukungan dari TNI terutama Divisi Siliwangi (Hill, 2011, hlm. 46). Keterlibatan militer dalam surat kabar yang dipimpinya tidak banyak mempengaruhi sikap Mochtar Lubis dalam mengkritik suatu hal baik pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.

Pada masa demokrasi liberal, Mochtar Lubis sering melakukan kritik terhadap pejabat negara. Seperti dalam persaingan ideologi yang semakin tidak sehat dimana Mochtar Lubis (2010, hlm. xxv) mengingatkan bahwa persaingan ideologi yang terjadi di Indonesia jangan sampai mengundang pihak asing terlibat dalam masalah negeri ini. Menurut Hill (2011, hlm. 45) mengungkapkan bahwa sikap dan komentar-komentar yang dilakukan oleh Mochtar Lubis telah membuat pihak penguasa merasa tidak nyaman hingga puncaknya Mochtar Lubis terpaksa harus masuk kedalam rumah tahanan pada 21 Desember 1956. Sikap kritiknya terhadap pemerintah telah membawa Mochtar Lubis menjadi seorang tahanan baik itu tahanan kota atau tahanan rumah. Tindakan penguasa memasukan Mochtar

Lubis ternyata tidak membuat tokoh ini diam melihat penindasan, karena untuk beberapa kali Mochtar Lubis masih dapat menulis di surat kabar *Indonesia Raya*. Tetapi ketika tidak diperbolehkan oleh pemerintah, Mochtar Lubis menuangkan pengalaman, keresahaan dan sikapnya selama menjadi tanahan dalam sebuah buku.

Dalam pada itu yang terang kelihatan bagi masyarakat ialah bahwa wartawan oposisi Mochtar Lubis buat beberapa waktu telah diisolir dan tidak diperekenankan menulis dan memimpin surat kabarnya. Kenyataan ini bukan suatu *compliment* bagi pemerintah Ali Sastroamidjojo. Dia mengandung suatu pengakuan, bahwa sekalipun pemerintah Ali mempunyai suatu kementerian penerangan dengan staf dan organisasinya yang lengkap, sekalipun dia mengontrol belasan stasiun RRI, sekalipun dia bisa mengerahkan begitu banyak surat kabar dan wartawan yang bersedia menyokong politiknya, namun dalam pertarungan ide (*battle of ideas*) yang pada hakekatnya pula adalah satu ciri demokratis, pemerintah Ali Sastroamidjojo merasa tidak mampu menghadapi wartawan Mochtar Lubis ... (Lubis, 1980, hlm. 50).

Pernyataan dalam bukunya tersebut jelas merupakan suatu sindiran bagi pemerintah yang waktu itu menahan Mochtar Lubis dengan tuduhan yang belum jelas. Mochtar Lubis beranggapan bahwa meskipun pemerintah dapat mengekang dirinya tetapi tidak dalam masalah ide atau pemikiran karena ia menilai bahwa kebebasan dalam berpikir adalah hak seorang manusia yang tidak dapat ditekan oleh pihak manapun. Tokoh ini juga menunjukkan bahwa sikapnya tidak dapat dipengaruhi oleh siapa pun sekalipun seorang Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo tetap tidak akan mengubah apa yang dikehendakinya sehingga Mochtar Lubis identik dengan pelabelan sebagai wartawan oposisi. Meskipun surat kabar *Indonesia* masih terbit untuk beberapa saat tetapi sikap konsisten Mochtar Lubis dan orang-orang yang ada didalam *Indonesia Raya* telah membuat pemerintah tidak nyaman hingga menutup surat kabar ini.

Kami semua telah melakukan perjuangan sampai saat terakhir. Harian *Indonesia Raya* tak pernah berkompromi dengan kebathilan. Yang berkuasa telah mematikan harian ini. Kami tidak akan menyesali diri dikemudian hari telah tidak menempuh segala jalan untuk meneruskan perjuangan kami. Selamat tinggal para pembaca kami tercinta (Lubis, 1980, hlm. 136)

Dengan keluarnya pernyataan tersebut Mochtar Lubis dan surat kabarnya telah konsisten melakukan perjuangan terhadap ketidakadilan. Mochtar Lubis

menyadari bahwa kemungkinan untuk *Indonesia Raya* terbit kembali adalah suatu hal yang sulit kecuali kondisi politik di Indonesia mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan melalui tulisannya tersebut Mochtar Lubis memilih berpamitan dengan para pembacanya. Ketika demokrasi dipimpin hal-hal serupa juga masih dilakukan oleh Mochtar Lubis, namun tidak seintensif pada masa demokrasi liberal. Hal tersebut didasarkan kepada Mochtar Lubis yang masih berstatus sebagai tahanan dengan ruang gerak Mochtar Lubis sangat dibatasi sehingga tidak lagi dapat melakukan kritik tajam seperti pada masa demokrasi liberal. Mochtar Lubis sering berpindah-pindah rumah tahanan, salah satunya ketika ia dipindahkan ke Madiun yang memiliki kesan tersendiri dimana Mochtar Lubis dan tahanan politik lainnya merasa diperlakukan dengan santun oleh para sipir (Hill, 2011, hlm. 106). Sisa waktu yang dimilikinya ketika dipenjara lebih banyak dihabiskan untuk membaca buku, menulis surat kepada keluarga, kerabat dan teman-temannya yang tergambar dalam pernyataan Mochtar Lubis sebagai berikut:

Waktu pertama kali ditahan, saya dimasukan sebuah sel kecil berisi 4 orang. Saya tidak bisa diam, maklum pertama kali. Dan sebelumnya saya biasa terus bergerak, berpergian kemana saja saya sukai. Saya tidak bisa tidur. Badan saya sakit semua. Tapi kemudian seakan-akan ada suara yang mengatakan pada saya agar berhenti merasa demikian, karena perasaan demikian hanya akan membuat saya sakit sendiri (Hadimadja, 1995, hlm. 113).

Tulisan diatas merupakan kesan Mochtar Lubis selama dipenjara, sikap dan kritiknya kepada pemerintah telah dinilai sebagai seorang subversif yang perlu dibungkam, salah satu cara yang ditempuh pada waktu itu adalah memasukan Mochtar Lubis kedalam jeruji penjara dengan mengisolir tokoh ini maka pemerintah mengharapkan agar Mochtar Lubis tidak lagi melontarkan kritiknya. Namun, Mochtar Lubis adalah sosok yang tidak bisa diam dimana selain ia berjuang melalui tulisan dalam surat kabar ia juga berjuang melalui bidang sastra.

Mochtar Lubis juga menyampaikan kritiknya melalui penulisan novel yang merupakan kegemarannya. Novel yang ditulisnya bukan saja berkisah mengenai kehidupan pribadi saja tetapi dalam novelnya juga sering menyisipkan

kritik sosial. *Senja di Jakarta* merupakan salah satu karya sastra Mochtar Lubis (1970) yang menggambarkan kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara pada tahun 1950-an dimana terdapat orang-orang yang ingin memperkaya dirinya sendiri tanpa melihat orang lain yang hidup dibawah garis kemiskinan. Gambaran novel tersebut merupakan hasil pengamatan Mochtar Lubis yang melihat kondisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi belum mampu mensejahterakan masyarakatnya karena masih tampak adanya ketimpangan sosial yang begitu jauh antara masyarakat yang miskin dengan masyarakat yang kaya.

Kedua tokoh wartawan ini berusaha menjalankan fungsinya mengawasi orang-orang yang memiliki kekuasaan (Putra, 2004, hlm. 137). Pengalamannya dalam bidang pers telah membawa Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar sama-sama melakukan perjuangan dalam melawan suatu tindakan yang tidak sepaham dengan pandangannya. Meskipun keduanya melakukan kritik tetapi dalam tindakanya kedua tokoh ini tidak selalu sama, tetapi memiliki sudut pandang tersendiri. Berdasarkan uraian diatas tergambar bagaimana kedua tokoh ini berjuang dalam surat kabar masing-masing tetapi sikap dan tindakan kedua tokoh ini memiliki perbedaan tersendiri. Selain itu, perbedaan muncul karena pengaruh lingkungan disekitar kedua tokoh ini. Deskripsi diatas menjelaskan bahwa Rosihan Anwar dekat dengan partai politik sedangkan Mochtar Lubis memiliki kedekatan dengan militer. Perbedaan dan Persamaan perjuangan kedua tokoh dalam memperoleh keadilan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tokoh-tokoh ini.

Selain penulis tertarik dengan latar belakang kehidupan kedua tokoh ini yang telah berkontribusi dalam membentuk sikap Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar, penulis juga memiliki keinginan untuk melengkapi penelitian terdahulu mengenai kedua tokoh ini karena dalam beberapa penelitian sebelumnya belum ada penelitian yang membandingkan kedua tokoh tersebut. Salah satunya adalah penelitian dari Albiner Hutauruk yang merupakan mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia Program Ilmu Sejarah tahun 2008. Tesis yang tidak diterbitkan ini mengangkat judul “Media Sebagai Alat Kontrol Sosial: Tajuk Tentang Politik dalam Warta Sepekan *SIASAT* 1950-1957”. Pada Tesisnya ini peneliti berfokus pada majalah *Siasat* yang dipimpin oleh Rosihan Anwar,

terutama pada perkembangan majalah tersebut dalam membela Indonesia ketika masa revolusi. Peneliti juga menjelaskan mengenai bagaimana kiprah dari *Siasat* selama tahun 1950-1957 yang identik sebagai media massa sosialis, hal tersebut tidak terlepas dari pendirinya yaitu Soedjatmoko yang memiliki kedekatan dengan Rosihan Anwar dan Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Sedangkan penelitian mengenai Mochtar Lubis, salah satunya adalah Skripsi tidak diterbitkan yang berjudul *Pers di Masa Orde Baru (Pembredelan Koran Indonesia Raya Tahun 1974)*. Skripsi tahun 2015 ini ditulis oleh Qodri Rahmanto Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Skripsi ini menitik beratkan kepada hubungan pers dengan pemerintah ketika masa orde baru yang mengalami perkembangan cukup menarik karena hubungan antara pers dan pemerintah tidak selalu baik bahkan setelah peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 banyak surat kabar yang dibredel. Salah satu dari surat kabar yang terkena dampak dari pembredelan tersebut adalah surat kabar *Indonesia Raya* yang dipimpin oleh Mochtar Lubis. Pada awal pemerintahan Orde Baru, surat kabar ini memang mendukung program pembangunan di Indonesia tetapi dalam perkembangannya pemerintah membatasi ruang gerak pers dengan menerbitkan Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan negara dan menjaga kewibawaan negara karena pemberitaan pers dianggap menjatuhkan wibawa negara. Sementara disisi lain surat kabar *Indonesia Raya* anti diplomasi dengan pemerintah yang mengakibatkan kepada nasib surat kabar ini yang terpaksa harus dibredel oleh pemerintah.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka posisi penelitian skripsi ini adalah membandingkan kedua tokoh yaitu Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis, baik dilihat dari latar belakang kehidupan masing-masing tokoh dan pandangan dan tindakan kedua tokoh tersebut dalam kurun waktu 1950-1965. Selain itu, penulis sebagai mahasiswa pendidikan sejarah merasa bahwa kajian mengenai tokoh pers masih belum banyak dilakukan terutama tokoh pers yang memiliki perhatian terhadap situasi politik masih jarang diangkat menjadi sebuah karya ilmiah sehingga penulis termotivasi untuk menulis mengenai kedua tokoh tersebut.

Dari latar belakang masalah inilah penulis menganggap perlu membahas **“PANDANGAN ROSIHAN ANWAR DAN MOCHTAR LUBIS DALAM PERKEMBANGAN POLITIK INDONESIA TAHUN 1950-1965”**

1.2 Rusmusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah utama yang akan dibahas adalah **bagaimana pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis dalam perkembangan politik Indonesia tahun 1950-1965?**. Untuk lebih memfokuskan kajian penelitian maka terdapat beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar?
2. Bagaimana pandangan Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar mengenai konsep dan pelaksanaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin?
3. Bagaimana Pandangan Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar terhadap kebebasan pers di Indonesia?
4. Bagaimana orientasi politik Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar pada tahun 1950-1965?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengidentifikasi latar belakang kehidupan Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar.
2. Menganalisis pandangan Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar mengenai konsep dan pelaksanaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.
3. Menganalisis pandangan Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar terhadap kebebasan pers di Indonesia.

4. Mengidentifikasi orientasi politik Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar pada tahun 1950-1965.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini secara umum adalah menambah pengetahuan mengenai Pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis dalam Perkembangan Politik Indonesia tahun 1950-1965. Sedangkan manfaat khusus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi dunia pendidikan, hasil penelitian ini menambah khazanah pengetahuan dan penulisan mengenai sejarah nasional dalam bidang pers, khususnya tokoh-tokoh pers nasional yang memiliki peranan penting dalam perkembangan pers Indonesia. Selain itu, menjadi salah satu materi ajar bagi guru dalam pembelajaran sejarah mengenai perkembangan pers dan perkembangan politik Indonesia tahun 1950 -1965. Pers tidak hanya berperan dalam menyampaikan beragam informasi yang dinilai penting tetapi pers dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam kondisi tertentu dituntut untuk menentukan sikap dan menerima konsekuensinya seperti yang tercermin dalam pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis sebagai seorang pemimpin redaksi dari surat kabar *Pedoman* dan *Indonesia Raya*.
2. Bagi masyarakat yang memiliki minat terhadap sejarah terutama sejarah pers, diharapkan skripsi ini bisa menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat terutama mengenai pandangan tokoh pers terhadap kehidupan politik di Indonesia dalam periode tertentu khususnya selama penerapan demokrasi liberal dan demokras terpimpin.
3. Manfaat nyata dari penulisan skripsi ini, diharapkan dapat menjadi bacaan masyarakat umum mengenai gambaran sudut pandang tokoh pers Indonesia yang mengalami sikap dan pandangan tertentu dalam meninjau kondisi politik di Indonesia. Dengan memahami perkembangan pers di Indonesia akan menambah wawasan serta khasanah pengetahuan kita.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Agar penelitian ini mudah dipahami, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah yang merupakan alasan peneliti mengambil tema ini beserta dengan rumusan masalah sehingga penelitian ini terfokus pada satu masalah yang dikaji peneliti. Selain itu, terdapat tujuan penulisan yang ingin disampaikan peneliti dalam penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab ini peneliti membahas mengenai literatur yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji pandangan politik Mochtar Lubis dan Rosidan Anwar pada tahun 1950-1965. Literatur yang digunakan, berkaitan dengan kedua tokoh tersebut serta periode yang digunakan peneliti yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1950-1965. Selain itu, pada bab ini juga membahas mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini yang berkaitan dengan tokoh yang memiliki pandangan politik maka konsep-konsep yang digunakan seperti konsep biografi, tokoh dalam sejarah, individu dan perubahan, kebebasan pers, politik dan media massa.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini membahas mengenai metode dan teknik penelitian, termasuk dalam bagaimana peneliti mencari berbagai sumber yang sesuai dengan topik penelitian hingga mengolah sumber-sumber yang diperoleh. Selain itu peneliti mengungkapkan langkah-langkah penelitian sejarah yang terdiri dari beberapa tahap yaitu heuristik atau mengumpulkan sumber, kritik terhadap sumber-sumber yang diperoleh. Setelah melalui tahapan kritik, proses selanjutnya adalah interpretasi dan penulisan sejarah atau historiografi dari berbagai sumber yang ada. Tahap historiografi merupakan langkah terakhir dalam proses penelitian ini.

Bab IV Pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis dalam Perkembangan Politik Indonesia Tahun 1950-1965. Pada bagian ini menjelaskan mengenai seluruh isi penelitian yang merupakan pertanyaan rumusan masalah yang telah disetujui oleh dosen pembimbing. Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam bab ini maka peneliti membagi bab ini kedalam beberapa sub-bab judul. Pertama, membahas mengenai latar belakang kehidupan Mochtar Lubis dan Rosihan

Anwar. Kedua, mengenai pandangan Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar mengenai konsep dan pelaksanaan demokrasi liberal serta demokrasi terpimpin. Ketiga, mengenai pandangan Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar terhadap kebebasan pers di Indonesia. Keempat, mengenai orientasi politik Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar pada tahun 1950-1965.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, bagian ini merupakan kesimpulan dan jawaban secara umum dari peneliti yang dapat diperoleh berdasarkan hasil pembahasan mengenai pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis dalam perkembangan politik Indonesia tahun 1950-1965 beserta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka merupakan rujukan yang digunakan penulis dalam skripsi “Pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis dalam Perkembangan Politik Indonesia Tahun 1950-1965”. Sumber-sumber yang digunakan penulis yaitu: buku, jurnal, majalah artikel dan sumber yang penulis peroleh dari internet.